

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Dominasi Eksekutif atas Legislatif dalam Praktek Penyelenggaraan Pemeintahan di Kota Bandar Lampung, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dominasi eksekutif atas legislatif terjadi dalam hubungannya membuat peraturan daerah dan penetapan anggaran (APBD). Dalam menjalankan hubungan kerja tersebut, pihak legislatif masih menjadi *rubber stamp* (tukang stempel) bagi pemerintah. Meskipun secara normatif (UU 32/2004) disebutkan bahwa kedua lembaga ini bersifat sejajar dan seimbang, namun dalam realita pihak eksekutif masih mendominasi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung. Dalam hubungan kerja membuat peraturan daerah, dominasi eksekutif dibuktikan melalui jumlah hak inisiatif yang dijalankan oleh masing-masing lembaga, di mana hak inisiatif yang dijalankan oleh pihak legislatif sangat rendah jika dibandingkan dengan inisiatif dari pihak eksekutif. Sedangkan dalam hubungan kerja menetapkan anggaran, dominasi eksekutif terjadi dalam hal rasio anggaran dan keseluruhan aktivitas anggaran. Lebih jauh, wujud lain

dari dominasi eksekutif atas legislatif terjadi karena adanya transaksi politik/lobi politik di antara kedua lembaga ini. Keadaan ini menyebabkan pihak legislatif menjadi tidak kritis dan pragmatis, sehingga langsung menyetujui inisiatif eksekutif tersebut tanpa terlalu mengkritisi substansi dari rancangan tersebut.

2. Akar masalah yang menyebabkan eksekutif lebih dominan daripada legislatif dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung.

- Ketimpangan penguasaan sumber kekuasaan politik (SDM, informasi, anggaran) antara eksekutif dan legislatif mempengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif, sehingga menyebabkan eksekutif lebih dominan dalam praktek pemerintahannya. *Pertama*, kualitas SDM pihak eksekutif memang lebih baik daripada pihak legislatif. Banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan ini terjadi, salah satunya adalah perbedaan latar belakang pendidikan formal, serta pelatihan masing-masing personel (eksekutif maupun legislatif). *Kedua*, penguasaan informasi yang dimiliki oleh eksekutif lebih akurat daripada informasi yang dimiliki oleh legislatif. Hal ini dikarenakan pihak legislatif sangat minim memperoleh sumber-sumber informasi yang valid. Sementara pihak eksekutif (walikota) banyak memiliki sumber informasi yang valid (birokrasi). *Ketiga*, dalam hal penguasaan anggaran,

pihak eksekutif adalah pihak utama yang melaksanakan seluruh aktivitas anggaran. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawaban, semuanya dilakukan oleh eksekutif. Meskipun pihak legislatif mempunyai fungsi budgeting (hak anggaran), namun senjata itu justru dijadikan alat tawar terhadap eksekutif untuk kepentingan pribadinya.

- Di Kota Bandar Lampung tidak mengenal istilah koalisi dan oposisi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahannya. Hampir semua anggota dewan dan partai ter-kartelisasi (berkoalisi) dengan eksekutif. Walaupun berbeda ideologi, partai-partai tersebut harus tetap mendukung eksekutif sebagai wujud kartelisasi politik. Hal tersebut tentu akan membuat eksekutif akan membuat eksekutif (walikota) dapat mengintervensi anggota dewan, sehingga keadaan tersebut semakin membuat eksekutif dominan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandar Lampung.
- Dalam pemerintahan di Kota Bandar Lampung, walikota (Eddy) telah berhasil menerapkan sistem *patron-client* dalam pemerintahannya. Terlebih lagi walikota (Eddy) merangkap jabatan sebagai ketua partai (Golkar). Keadaan ini tentu membuat anggota dewan yang berasal dari partai politik yang sama dengan eksekutif (walikota), akan sangat menghormati dan segan kepada pimpinan partainya. Keadaan tersebut akan berlanjut di dalam

praktek pemerintahan (Pemerintah dan DPRD), di mana setiap kebijakan kepala daerah akan selalu mendapat dukungan dari bawahannya di partai.

## B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya anggota dewan memaksimalkan fasilitas yang diberikan pemerintah (Pengembangan SDM, Bimtek, dan sebagainya) untuk meningkatkan mutu dan kualitas SDM-nya. Lebih jauh, sebaiknya partai politik lebih kompeten dalam rekrutmen kader dan melakukan pembinaan/memberikan diklat kepada kader, khususnya bagi kadernya yang berada di dewan/DPRD.
2. Anggota dewan sebaiknya memaksimalkan waktu *reses* untuk terjun ke masyarakat. Tujuannya agar anggota dewan dapat melihat keadaan masyarakat yang sebenarnya. Sehingga dapat mewakili jeritan rakyat ketika sidang paripurna bersama pihak eksekutif. Lebih jauh disarankan agar pihak DPRD mempunyai lembaga riset yang khusus di bawah naungan DPRD agar memiliki informasi yang berkualitas dan akurat tentang informasi yang ada di masyarakat.
3. Sebaiknya eksekutif tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik tertentu dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan. Karena

hal tersebut akan menimbulkan semacam “*conflict interest*”, di mana akan berdampak negatif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Partai politik harus berani untuk bertindak sebagai oposisi dalam pemerintahan. Hal tersebut diharapkan agar tercipta persaingan (secara sehat) serta dapat mengkritisi dan mengontrol pemerintahan dengan baik pula. Jika masing-masing partai sadar dan berbuat demi kepentingan rakyat, bukan lagi untuk perburuan rente, maka kesejahteraan rakyatpun akan semakin meningkat.